

ABSTRAK

Diangkatnya judul **Deskripsi Tentang Tindak Pidana Perpajakan Berupa Tidak Menyetor Pajak Yang Dipotong Atau Dipungut**, sebagai suatu penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi, dilatari oleh fakta tentang bermunculannya tindak pidana perpajakan yang marak, akhir-akhir ini. Dari fakta ini dirumuskan 3 (tiga) permasalahan penelitian, yakni;

- 1) Apa yang menjadi motif terdakwa melakukan tindak pidana tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut? 2) Bagaimana modus dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut? Dan 3) Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana perpajakan terhadap terdakwa dan barang bukti? Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui motif dari pelaku melakukan tindak pidana tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut; untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana tidak menyeto pajak yang dipotong atau dipungut; dan untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut. Metode yang dipakai dalam menganalisis permasalahan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif sebagai sifat penelitian dan jenis penelitian normatif serta metode analisisnya deskriptif kualitatif. Hasil analisis memperlihatkan bahwa dalam hal mencari motif, modus dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana perpajakan dalam bentuk tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut dan akibat hukum dari tindak pidana perpajakan terhadap pelaku, barang bukti dan negara terurai berikut ini. Motif terdakwa melakukan tindak pidana tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut adalah motif ekonomi, berupa mencari keuntungan atau memperkaya diri. Modus dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut adalah: terdakwa melakukan penyalahgunaan kepercayaan; terdakwa dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan; terdakwa tidak menggunakan pt yang didirikan tersebut, tetapi menggunakan pt yang lain untuk proyek pengadaan barang dan jasa; dan terdakwa tidak melaporkan SPT tahunan PPh Akibat hukum dari tindak pidana perpajakan berupa tidak menyetor pajak yang dipotong atau dipungut terhadap pelaku/terdakwa, negara dan barang bukti. Dimana; terhadap Terdakwa; 1) Terdakwa dipidana penjara; 2) Terdakwa Dikenai Denda; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara. Terhadap negara: Akibat perbuatan terdakwa berupa tidak menyetor pajak pajak yang dipotong atau dipungut, maka negara mengalami kerugian. Sedangkan terhadap barang bukti: Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara; Menetapkan barang bukti dirampas untuk negara; Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Penyidik PPNS Kanwil DJP Jawa Barat I; dan Menyatakan barang bukti diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda. Rekomendasi akademis dari penulis adalah *Pertama, Kepada Aparat Penegak Hukum*: Aparat penegak hukum diharapkan memeriksa perkara tindak pidana perpajakan secara profesional dengan mempertimbangkan secara proporsional hubungan antara kualitas perbuatan terdakwa dan pidana yang dijatuhkan. *Kedua, Kepada Masyarakat*: Penerapan pidana penjara dan denda yang sebanding diharapkan menimbulkan efek jera serta meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai hak negara.

Kata Kunci: Motif; modus; akibat hukum; pelaku; tindak pidana perpajakan.

ABSTRACT

The title "Description of Tax Crimes in the Form of Failure to Pay Withheld or Collected Taxes" was chosen as a scientific paper in the form of a thesis, motivated by the recent rise in tax crimes. Based on this fact, three research questions were formulated: 1) What motivated the defendant to commit the crime of failing to pay withheld or collected taxes? 2) What was the defendant's modus operandi in committing the crime of failing to pay withheld or collected taxes? And 3) What are the legal consequences of this tax crime for the defendant and the evidence? The objectives of this research are to determine the motives of the perpetrators in committing the crime of failing to pay withheld or collected taxes; to determine how the perpetrators committed the crime of failing to pay withheld or collected taxes; and to determine the legal consequences of failing to pay withheld or collected taxes. The method used to analyze this research problem is a descriptive approach, as the nature of the research is normative, and the analysis method is descriptive qualitative. The analysis reveals that in terms of identifying the motive and modus operandi of the defendant in committing the tax crime of failing to pay withheld or collected taxes, the legal consequences of this tax crime for the perpetrator, the evidence, and the state are outlined below. The defendant's motive for committing the crime of failing to pay withheld or collected taxes is economic, in the form of seeking profit or self-enrichment. The defendant's modus operandi in committing the crime of failing to pay withheld or collected taxes are as follows: the defendant abused trust; the defendant intentionally failed to submit a notification letter; the defendant did not use the established limited liability company (PT) but used another PT for the procurement of goods and services; and the defendant failed to file an annual income tax return (SPT PPh). The legal consequences of this tax crime of failing to pay withheld or collected taxes for the perpetrator/defendant, the state, and the evidence are as follows: 1) The defendant is sentenced to imprisonment; 2) The defendant is fined; Ordering the defendant to remain in detention; Determining that the length of the defendant's detention be deducted entirely from the sentence imposed; and Ordering the defendant to pay court costs. To the state: As a result of the defendant's actions in the form of not paying the withheld or collected taxes, the state suffered losses. Meanwhile, regarding the evidence: Determine that the evidence remains attached to the case file; Determine that the evidence is confiscated for the state; Declare that the evidence is returned to the PPNS Investigator of the West Java I Regional Office of the Directorate General of Taxes; and Declare that the evidence is calculated as payment of criminal fines. The author's academic recommendations are First, To Law Enforcement Officials: Law enforcement officials are expected to examine tax crime cases professionally by considering proportionally the relationship between the quality of the defendant's actions and the penalties imposed. Second, To the Community: The application of comparable prison sentences and fines is expected to have a deterrent effect and increase public awareness, especially business actors, to fulfill tax obligations as a state right.

Keywords: Motive; modus; legal consequences; perpetrator; tax crime.